



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: M.HH-11.AH.11.01 TAHUN 2015

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN SUSUNAN ANGGARAN DASAR, ANGGARAN RUMAH TANGGA, DAN
SUSUNAN PERSONALIA
DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA
PERIODE 2015-2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

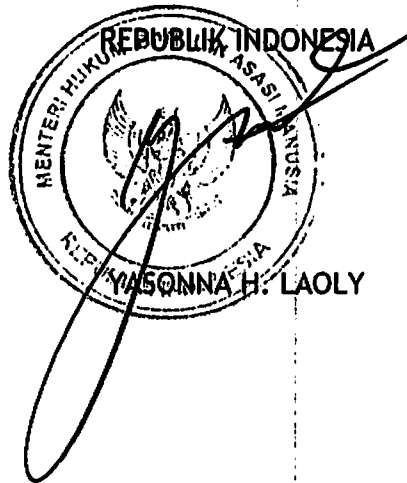
- Membaca : Surat permohonan dari Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPN PKP Indonesia) Nomor: 05/DPN PKP IND/V/2015 tanggal 20 Mei 2015 tentang Permohonan Pengesahan Kepengurusan DPN PKP INDONESIA Periode 2015-2020 dan Penyempurnaan AD ART Hasil Kongres IV PKP INDONESIA Tahun 2015.
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan serta penelitian terhadap berkas permohonan dari Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPN PKP Indonesia) yang disampaikan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 25, Pasal 32, Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN DASAR, ANGGARAN RUMAH TANGGA, DAN SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI Keadilan dan PERSATUAN INDONESIA PERIODE 2015-2020
- PERTAMA** : Mengesahkan Permohonan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dengan kedudukan kantor tetap di Jl. Diponegoro No. 63, Menteng, Jakarta Pusat, Kode Pos 10310. Telp: (021) 31922733 Fax. (021) 31922822 yang dinyatakan dengan Akta Tentang Perubahan dan Penegasan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia No. 21 Tanggal 21 Mei 2015 serta Akta Tentang Pernyataan Keputusan Tim Formatur Kongres IV Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Tahun 2015 Nomor 22 tanggal 21 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Refizal, S.H, M.Hum. berkedudukan di Jakarta.
- KEDUA** : Susunan kepengurusan tingkat pusat partai politik tersebut terlampir dalam Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT** : Setelah berlakunya keputusan ini, maka susunan kepengurusan sebagaimana tercantum pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.HH-05.AH.11.01 Tahun 2013 tanggal 17 April 2013 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Masa Bakti 2010-2015 dan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagaimana tercantum pada keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-12.AH.11.01 Tahun 2010 tanggal 27 Agustus 2010 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah tangga, dan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Masa Bakti 2010-2015 tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA





**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran

**Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia**

Nomor : M.HH-11.AH.11.01 TAHUN 2015

Tanggal : 15 JUNI 2015

**PENGESAHAN PERUBAHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN
DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia
2015-2020**

Ketua Umum : Letjen TNI (Purn.) Dr.(H.C.) Sutyoso, S.H.

Wakil Ketua Umum : Isran Noor

Wakil Ketua Umum : Ir. Samuel Samson, M.Si.

KETUA- KETUA

Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi : Jeffry Palijama, S.H.

Ketua Bidang Kewilayahan : Ir. H. Muhammad Nasir Nawawi

Ketua Bidang Legislator : Ashary Ali Agus, SE. M.M

Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan : Drs. Zindar Kar Marbun, M.Sj, M.H.

Ketua Bidang Komunikasi, Media Massa dan Penggalangan Opini : Asmara Roni, B.E.

Ketua Bidang Ideologi, Politik dan Keamanan : Romulus S. Sihombing, S.H.

Ketua Bidang Ekonomi : Dr. Hotner Tampubolon, S.E, M.M.

Ketua Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral : Suparta

Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia : Tjindra Parma, S.H, M.H.

Ketua Bidang Kesejahteraan Sosial : Ellen Sukmawati, S.H, M.Kn.

Ketua Bidang Pendidikan dan Keagamaan : Huala Siregar, S.H.

Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak : Juanita L. Suling

Ketua Bidang Seni dan Budaya : Camelia Panduwinata Lubis, S.E.

Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga : Rully Soekarta
Ketua Bidang Tani dan Nelayan : Ir. Andreas Tanadjaja, M.M.
Ketua Bidang Buruh dan Tenaga Kerja : Ir. Daulat Sinuraya, M.B.A, M.M.
SEKRETARIS JENDERAL : H. Didi Supriyanto, S.H, M.Hum.

WAKIL-WAKIL SEKRETARIS JENDERAL

Wakil Sekretaris Jenderal : H. Supratman, S.E, M.H.
Wakil Sekretaris Jenderal : Uus Ali Husni, S.Kom.
Wakil Sekretaris Jenderal : Ir. Takudaeng Parawansa
Wakil Sekretaris Jenderal : Drs. Safi'i Imam Saksono
Wakil Sekretaris Jenderal : Winarsih Dewi, S.H, S.E.

BENDAHARA UMUM

: Ie Kiang Ging (Cing-Cing)

WAKIL-WAKIL BENDAHARA UMUM

Wakil Bendahara Umum : Dra. Muthiah Alhasani
Wakil Bendahara Umum : Dewi Ayu Trisna
Wakil Bendahara Umum : Andi Walenreng, S.H.

KORWIL-KORWIL

Korwil I Wilayah Sumatera : Haryanto, S.H.
Korwil II Wilayah Jawa, Bali, NTB, NTT : Ismail Ibrahim, S.H.
Korwil III Wilayah Kalimantan : Drs. Muslim Mashudi, M.B.A.
Korwil IV Wilayah Sulawesi : Safril Partang, S.H, M.H.
Korwil V Wilayah Maluku, Malut, Papua dan
Papbar : Upa Labuhari, S.H.

DEPARTEMEN-DEPARTEMEN

Departemen Organisasi : Dr. Harapan Tarigan, S.E, S.H, M.M.
: Yos Huaniel Toding
: S. Fransiska H.M. Sinaga, S.H.
Departemen Kadersisasi dan Keanggotaan : Drs. Sarjono Jahidi
: Drs. Jisman Hutapea
: Drs. Deden Supriadi
: Abraham Oppier, S.E.

Departemen Pembinaan Legislator : Alina Maya Lengkong
: Karolus Paulus Sani Kleden, S.Sos.

Departemen Administrasi Legislator : Indri Yuli Hartati
: Wati Kus Endang, S.E.

Departemen Kajian Strategis : H. Amin Kias, S.H.
: Dr.(c) Syarifuddin Noor, S.H, M.H.

Departemen Penelitian dan Pengembangan : Ir. H. Muslimi, M.M.
: Bernaditha R. Yayuk Weking
: Pungki W.S, M.M.

○ Departemen Pendataan dan Statistik : Ir. Noni S. Christina Kune
: Hj. Susiana
: Sitha Mawarti

Departemen Hubungan Masyarakat : Leony Agustina Diani, S.E.
: Apri Novita
: Shahab Fadilah

Departemen Informasi dan Komunikasi : Ruslim Rohimun Sembiring
: Maladyna Laurensia
: A. Hermawan
: Rina Komala

○ Departemen Penggalangan Opini : Junita Tanudirja, S.H. M.Kom.
: Ir. Ishak R
: Tiara Larasati, S.Kom.

Departemen Ideologi : Samuel Parantean
: Tammy Cicillia

Departemen Politik dan Pemerintahan : M. Rusli Zamzami Said
: Dr. Koesnadi Notonogoro, S.H.
: Danny Agus Surono Sunaryadi, S.T.

Departemen Politik Luar Negeri : Muclis Bahsinar
: Drs. Firdaus Efendi, M.M.

Departemen Pertahanan dan Keamanan : Ir. Sabar Hotma Maruli Situmorang
: Leo Pandapotan Simangunsong
: Victor Gomies

Departemen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif : Erwin Reza Bachtiar
: Wiwin Agustina (alias Ayu)

Departemen Koperasi : Agung Antonio Toding
: Jennifer Cynthia, M.M.
: Rina Luthfya, S.E.

Departemen Usaha Kecil dan Menengah : Sandjaja Darmawan
: Bandar Gultom
: Hj. Ping Nurlisa
: Reni Aprita

Departemen Perdagangan : Wahyu Raja Intan
: Mieske
: Axnes Sukmawati

Departemen Perindustrian : Benny Tjandra
: H. Said Saida, S.H.
: Jullya Feronica
: Eldora Yotasia

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral : Drs. Cening Widhiana, M.M.
: Yongky Milson Kaihatu
: Ana Legyanningsih

Departemen Hukum : Mustafa Kamal, S.H, M.H.
: Dara Farasita, S.H.
: Eva Fitriani, S.H.

Departemen Hak Asasi Manusia : Agung Sri Purnomo, S.H, M.H.
: Dra. Dyah Bintarini, M.M.
: Maryam Jenny Morin

Departemen Pemberantasan Korupsi, Mafia Hukum dan Narkoba : Hj. Mardiana, S.H.
: Destya Purna Panca, S.H.

Departemen Sosial dan Penanggulangan Bencana	: Luana Saskia, S.H. : Deasy Amelia, S.E.
Departemen Kesehatan	: dr. Myra Yohana Lengkong
Departemen Lingkungan Hidup	: Supardiyo, S.E. : Astrid Cinderella Bisara
Departemen Pendidikan dan Iptek	: Mustofa, M. Si. : R.A. Ayu Susanne A.W. Puspokusumo, Dip. Ing : Reny Lukman, S.Pd. : Vanda
Departemen Keagamaan	: H.M. Sodri : Roberd A.B. Selan, M.Pd, Ph.D.
Departemen Pemberdayaan Perempuan	: Anggraeni A. Nazar : Dyah Puspitasari : Dewi Anita Matrutty, S.E, M.M.
Departemen Perlindungan Anak	: Liring Duhita Dewi : Kemala Dewi, S.H, M.H. : Dewi Anggraeni, S.E, M.M.
Departemen Seni dan Budaya	: Nuno Guil Hermino Pacheco Magno, S.H, M.H, CLA. : Anneke Puspa Calliandra Matondang, S.I.A
Departemen Pemuda dan Olahraga	: Dimas Danindro : Raja Bona P. Saragih : Muhazir Burma : M. Reza Ramadhan
Departemen Tani	: Nanekram Harumal Nandwani : Shinta Santini Setyowati
Departemen Nelayan	: Edison Prapat : Dex Raranta
Departemen Perlindungan Tenaga Kerja	: Abdul Jabar, S.H. : Sugeng Friyanni

Departemen Pendayaan Tenaga Kerja : Drs. Pardaeen Simanjuntak, M.Si.

Departemen Pelatihan dan Produktivitas : Elvis Liyanto, S.E.

Tenaga Kerja : Dra. Hj. Yunani R.

KORDA/SETINGKAT DEPARTEMEN

Korda 1: Wilayah Aceh, Sumut & Riau : Indra Azmi, S.E.

Korda 2: Wilayah Sumbar & Kepri : Suparno P.R, M.B.A.

Korda 3: Wilayah Bengkulu & Jambi : Suyatno Hadiwibowo

Korda 4: Wilayah Sumsel, Babel & Lampung : Ir. Surya Chandra Salim

Korda 5: Wilayah Jabar, DKI & Banten : Drs. H. Purnawarman Kias, S.H.

Korda 6: Wilayah Jateng & DIY : Pius Gora

Korda 7: Wilayah Jatim & Bali : Heru Pragolo, S.H, M.H.

Korda 8: Wilayah Kalbar & Kalteng : Marselus Uthan, S.Sos.

Korda 9: Wilayah Kaltim, Kalsel & Kaltara : H. Eddy Wellianto, M.B.A.

Korda 10: Wilayah Sulut, Sulteng & Gorontalo : Ronald Pauner

Korda 11: Wilayah Sulsel, Sulbar & Sultra : Suzanna Kaharuddin, S.Sos.

Korda 12: Wilayah NTB & NTT : Drs. Yan R. Mboeik

Korda 13: Wilayah Maluku & Malut : Noya Lenda Meilani, S.H, M.H.

Korda 14: Wilayah Papua & Papbar : dr. Rosaline Irene Rumaseuw, M. Kes.

Dewan Penasehat

Ketua : Jenderal TNI (Purn.) Try Sutrisno

Wakil Ketua : Letjen TNI (Purn.) Syaiful Sulun

Sekretaris : Dr. Ir. Djiteng Roedjito

Anggota : Mayjen TNI (Purn.) Haris Sudarno

Anggota : Lulu Lugiyati Edi Sudradjat

Anggota : Sri Herawati

Anggota : Bea Larasati Iskandar, S.Kom.

Anggota : Brigjen TNI (Purn.) Victor Phaing

Anggota : Buyung Atang Philiang

Dewan Pakar

- Ketua : Prof. Dr. Sri Edi Swasono
- Wakil Ketua : Prof. Sodik
- Sekretaris : Dr. Ir. Sumbangan Baja, M. Sc.
- Anggota : Prof. Dr. Meutia Hatta
- Anggota : Tjetje Hidayat Padmadinata
- Anggota : Mayjen TNI (Purn.) Monang Siburian
- Anggota : Dr. Pandji Hadinoto
- Anggota : Prof. Dr. Rivai, M.B.A, M.Si
- Anggota : dr. Romansyah Sahabuddin, S.E, M.Si
- Anggota : Faisal Matriadi, S.E, M.Si.
- Anggota : Wahyu Saputra, S.E.

Mahkamah Partai

- Ketua : Letjen TNI (Purn.) M. Yusuf Kartanegara, S.H.
- Sekretaris : Rusdi Taher, S.H.
- Anggota : Drs. Jimmy E. Jambak
- Anggota : Marsdya TNI (Purn.) Budhy Santoso, S.E.
- Anggota : Mayjen TNI (Purn.) Mashudi Darto

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

